



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) 2024

**DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN KARANGANYAR**

DAFTAR ISI

	Hal
HALAMAN JUDUL	I
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
KATA PENGANTAR	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Gambaran Umum	2
C. Isu Strategis	8
D. Landasan Hukum	10
E. Sistematika Penulisan	11
BAB II PERENCANAAN STRATEGIS	13
A. Rencana Strategis	13
B. Rencana Kinerja Tahunan	14
C. Perjanjian Kinerja	16
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	17
A. Capaian Kinerja Organisasi	18
B. Analisis Capaian Kinerja, tujuan dan Sasaran	21
C. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Dana	28
D. Akuntabilitas Anggaran	29
BAB IV PENUTUP	33
A. Kesimpulan	33
B. Saran	33

DAFTAR TABEL

	Hal
1.1. Jumlah Pegawai Menurut Tingkat Pendidikan	4
1.2. Jumlah Pegawai berdasarkan Golongan	5
1.3. Data Sarana dan Prasarana	6
2.1. Tujuan, Sasaran, Indikator dan target Kinerja	14
2.2. Rencana Kinerja Tahunan Diskominfo	15
2.3. Perjanjian Kinerja	16
3.1. Kriteria Penilaian	18
3.2. Ringkasan Capaian Indikator Kinerja Utama	20
3.3. Pengukuran Kinerja	26
3.4. Efisiensi Penggunaan Sumber Dana	28
3.5. Realisasi Anggaran Diskominfo	29

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT karena atas limpahan rahmat dan karuniaNya maka Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Karanganyar Tahun 2024 telah selesai disusun.

LKjIP ini secara garis besar berisi Laporan Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Karanganyar. LKjIP ini diharapkan dapat dipergunakan untuk evaluasi akuntabilitas kinerja bagi pihak yang membutuhkan, penyempurnaan dokumen perencanaan, pelaksanaan program dan kegiatan yang akan datang serta penyempurnaan berbagai kebijakan yang diperlukan.

Dalam penyusunan LKjIP ini kami menyadari sepenuhnya bahwa belum sempurna serta masih ada kekurangannya, maka dari itu kami mengharapkan masukan serta saran demi sempurnanya Laporan Kinerja ini. Kepada semua pihak yang telah membantu kami sampaikan terima kasih dan semoga LKjIP Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Karanganyar Tahun 2024 ini dapat memberikan manfaat secara positif bagi masyarakat dan Pemerintah Kabupaten Karanganyar.

Karanganyar, 6 Februari 2025



KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN KARANGANYAR

ISNAN NUR AZIZ, S.Kom.

Pembina Tingkat I

NIP. 19780210 20200501 1 016

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang.

Salah satu azas penyelenggaraan *good governance* yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme adalah azas akuntabilitas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Akuntabilitas tersebut salah satunya diwujudkan dalam bentuk penyusunan Laporan Kinerja.

Selain untuk memenuhi prinsip akuntabilitas, Laporan Kinerja tersebut merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Karanganyar Tahun 2024 disusun sebagai salah satu bentuk pertanggung jawaban atas pelaksanaan penyelenggaraan urusan komunikasi dan informatika, bidang persandian dan statistik selama Tahun 2024, sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Karanganyar Nomor 10 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2024-2026.

Laporan Kinerja ini diharapkan dapat digunakan sebagai upaya perbaikan untuk peningkatan kinerja Organisasi serta untuk mendapatkan masukan dari *stakeholders* demi perbaikan kinerja pada Dinas Komunikasi dan Informatika yang berkelanjutan.

1.2. Gambaran Umum

Berdasarkan Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 116 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika, maka sesuai dengan Pasal 2, Dinas Komunikasi dan Informatika merupakan unsur pelaksana urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika, Bidang Persandian dan Bidang statistik yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

1. Struktur Organisasi.

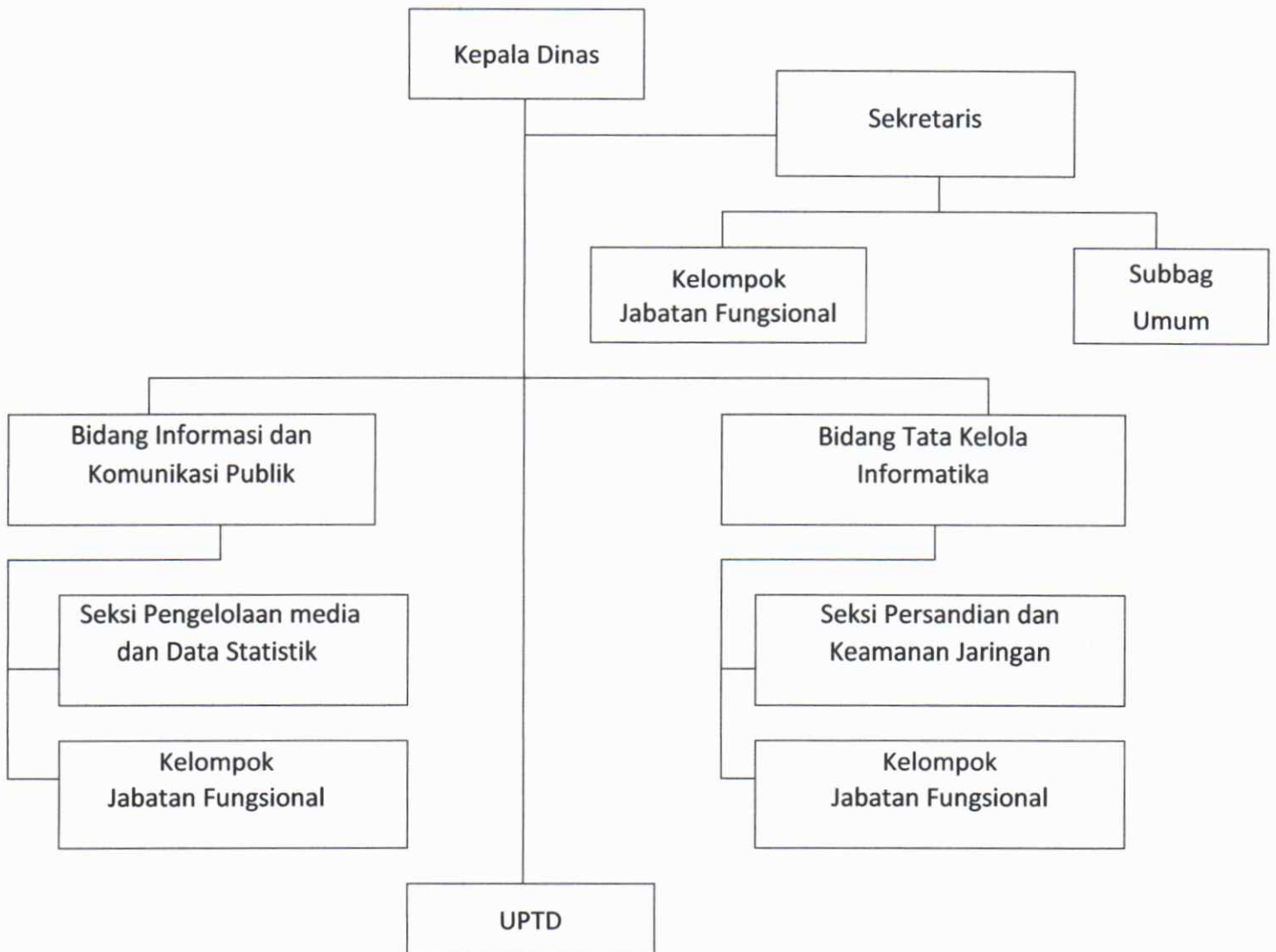
Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Karanganyar dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karanganyar sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 22 Tahun 2019 tentang Perubahan Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karanganyar dan Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 90 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 34 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas Jabatan Pimpinan Tinggi, Administrator dan Pengawas pada Dinas Daerah.

Susunan Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Karanganyar adalah sebagai berikut:

- a. Kepala Dinas
- b. Sekretaris membawahi
 - 1) Subbag Umum
 - 2) Kelompok Jabatan Fungsional
- c. Bidang Informasi dan Komunikasi Publik membawahi
 - 1) Seksi Pengelolaan Media dan Data Statistik
 - 2) Kelompok Jabatan Fungsional
- d. Bidang Tata Kelola Informatika membawahi
 - 1) Seksi Persandian dan Keamanan Jaringan
 - 2) Kelompok Jabatan Fungsional

Bagan Susunan Organisasi Diskominfo Kabupaten Karanganyar

**BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**



Gambar 1.1
Struktur Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Karanganyar

2. Sumber Daya.

a. Sumber Daya Manusia.

Pemerintahan yang baik (*good governance*) adalah prasyarat terbentuknya sistem birokrasi yang efektif dan demokratis. Sumberdaya manusia merupakan faktor kunci dalam kinerja birokrasi. Kualitas SDM yang baik akan mampu mendorong percepatan pencapaian tujuan dan sasaran. Jumlah pegawai di Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Karanganyar keadaan per Desember 2024 sejumlah 58 Orang, dengan komposisi rinci sebagai berikut :

Tabel 1.1.
Jumlah Pegawai Menurut Tingkat Pendidikan Tahun 2024

No	Tingkat Pendidikan	PNS		Non PNS		Jumlah
		L	P	L	P	
1.	S2/ Magister	3	4	-	-	7
2.	S1/ Sarjana	10	6	-	-	16
3.	D III	3	1	-	-	4
4.	D II	-	-	-	-	-
5.	SMA/ Sederajat	4	3	-	-	7
6.	SMP/ Sederajat	-	-	-	-	-
7.	P3K	3	2	-	-	5
8.	THL	-	-	8	4	12
9.	TA			6	1	7
	Jumlah Total	23	16	14	5	58

Sumber : Diskominfo Kabupaten Karanganyar, Desember 2024

Tabel di atas menunjukkan bahwa komposisi pegawai berdasarkan tingkat pendidikan cenderung sedang. Hal ini dapat dilihat data berpendidikan sebagai berikut :

- S2 sebesar 12,5% : 7 Orang
- S1 sebesar 28,57% : 16 Orang
- D III sebesar 7,14% : 4 Orang
- D II sebesar - % : -
- SMA sebesar 12,5% : 7 Orang
- SMP sebesar - % : -

- P3K sebesar 8,92% : 5 Orang
- THL sebesar 21,42% : 12 Orang
- TA sebesar 12,5% : 7 Orang

Berdasarkan golongan pegawai di Diskominfo Kabupaten Karanganyar terdiri dari

- Golongan IV sebanyak : 6 Orang
- Golongan III sebanyak : 23 Orang
- Golongan II sebanyak : 6 Orang
- Golongan I sebanyak : 1 Orang
- Non Golongan sebanyak : 24 Orang

selengkapnya jumlah pegawai berdasarkan golongan dapat dilihat pada tabel berikut di bawah ini :

Tabel 1.2.
Jumlah Pegawai berdasarkan Golongan Tahun 2024

No	Golongan	L	P	Jumlah
1.	Golongan IV	2	2	4
2.	Golongan III	12	11	23
3.	Golongan II	15	1	6
4.	Golongan I	1	-	1
5.	Non Golongan	17	7	24
	Jumlah	37	21	58

Sumber : Diskominfo Kabupaten Karanganyar, Desember 2024

b. Sarana dan Prasarana (Asset).

Sarana dan Prasarana dalam mendukung tugas dan fungsi menjadi hal yang sangat urgen untuk disediakan dalam kondisi baik. Ketersediaan sarana dan prasana sangat berpengaruh terhadap pelaksanaan kegiatan di Diskominfo Kabupaten Karanganyar. Adapun sarana dan prasarana yang dimiliki Diskominfo keadaan bulan Desember 2024 dalam mendukung pelaksanaan tugas dapat dilihat pada Tabel 1.3. di bawah ini

Tabel 1.3
Data Sarana dan Prasarana
Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Karanganyar
Tahun 2024

No	Jenis Sarana dan Prasarana	Kondisi		Jumlah
		Baik	Rusak	
1	Kendaraan roda 4	6	2	8
2	Kendaraan roda 2	9	-	9
3	AC Split	17	-	17
4	Audio Amplifier	1	-	1
5	Camera Video	11	-	11
6	Gambar Presiden/Wapres	1	-	1
7	Filling Besi/ Meta	5	-	5
8	Handy Cam	1	2	3
9	Kipas Angin	-	1	1
10	Kursi Putar	11	-	11
11	Kursi Lipat	101	-	101
12	Kursi Tamu	2	-	2
13	Lambang Negara (Garuda)	4	-	4
14	Laptop	37	-	37
15	Lensa Kamera	2	-	2
16	Meja Kerja Pegawai	25	-	25
17	Meja Kerja Eselon IV	3	-	3
18	Modem	1	-	1
19	Note Book	10	-	10
20	PC Unit/Komputer PC	61	-	61
21	Printer	33	-	33
22	Scanner	3	-	3
23	Sound System	2	-	2
24	Tangga Aluminium	2	-	2
25	Televisi	5	-	5
26	UPS	16	-	16
27	White Board	1	-	1
28	Wireless	24	-	24

No	Jenis Sarana dan Prasarana	Kondisi		Jumlah
		Baik	Rusak	
29	Stabilisator	2	-	2
30	Monitor	9	-	9
31	AC Window	1	-	1
32	Loudspeaker	2	-	2
33	Microphone	12	-	12
34	Switcher/Menara Antena lainnya	5	-	5
35	Peralatan Pemancar VHF/FMnnya	6	-	6
36	Microphone Table Stand	3		3
37	Microphone/Wireless Mic	1	-	1
38	Off Air TV Monitor	4	-	4
39	Alat Kantor Lainnya	2	-	2
40	Kursi Besi/Metal	13	-	13
41	Meja Bundar	2	-	2
42	Meja ½ Biro	11	-	11
43	Kursi Fiber Glas/Plastik	3	-	3
44	Kursi Tamu	2	-	2
45	Perlatan Studio Audio Linnya	9	-	9
46	Power Amplifier	2	-	2
47	Meja Komputer	12	-	12
48	Uninterruptible Power Suply (UPS)	8	-	8
49	Komputer Unit Lainnya	5	-	5
50	Netware Interface External	1	-	1
51	TV Video Wall 55"	6	-	6
52	Ubiquity Unity AC mesh	1	-	1
53	Termogan	1	-	1
54	Lemari Besi	4	-	4
55	Wifi Router	17	-	17
56	Router	6	-	6
57	CCTV Outdoor	8	-	8
58	CCTV Indoor	2	-	2
59	Camcorder	1	-	1

No	Jenis Sarana dan Prasarana	Kondisi		Jumlah
		Baik	Rusak	
60	Telepromter	1	-	1
61	Telephone mobile	6	-	6
62	Tripod	4	-	4
63	Papan visual	17	-	17
64	Portable hard disk	4	-	4
65	Lemari es	1	-	1
66	Kursi Eselon III	1	-	1
67	Kursi Eselon IV	1	-	1
68	Dispenser	1	-	1
69	Safety Belt	1	-	1
	Jumlah			

Sumber : Diskominfo Kabupaten Karanganyar, Desember 2024

Berdasarkan tabel di atas, kondisi sarana dan prasarana sudah cukup baik, akan tetapi belum memiliki gedung kantor atas nama Diskominfo dalam menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi.

1.3. Isu Strategis.

Berdasarkan analisa terhadap permasalahan daerah serta telaahan terhadap isu strategis di tingkat nasional dan Provinsi Jawa Tengah, maka Pemerintah Kabupaten Karanganyar menetapkan isu strategis daerah sebagai berikut :

1. Kemiskinan
2. Kualitas Sumber Daya Manusia
3. Daya Saing Ekonomi
4. Reformasi Birokrasi
5. Daerah Rawan

Sesuai dengan permasalahan pembangunan yang dihadapi, tantangan dan potensi pembangunan yang dikembangkan, maka ditetapkan isu strategis Diskominfo sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya adalah sebagai berikut :

Globalisasi menuntut pemerintahan bersikap keterbukaan, demokratis, dan menghormati hak-hak asasi manusia. Jika pemerintahan dijalankan secara jujur, bersih dan dinamis tentunya akan mendapat tanggapan positif dari rakyat. Tanggapan positif tersebut berupa rasa nasionalisme terhadap negara menjadi meningkat. Negara tidak lagi dianggap sebagai pemegang kunci dalam proses pembangunan. Globalisasi juga meningkatkan jumlah dan ragam organisasi non pemerintah, yang mendapatkan sponsor lembaga donor untuk menguatkan peran masyarakat mendukung pelaksanaan pemerintahan agar transparan dan akuntabel. Komponen pembentuk isu “Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Kolaboratif, Akuntabel, dan Mengayomi”

Kemudian sesuai dengan permasalahan pembangunan yang dihadapi, tantangan dan potensi pembangunan yang dikembangkan, maka ditetapkan isu strategis utamanya di isu Reformasi Birokrasi maka Diskominfo sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya adalah sebagai berikut :

a. Manajemen Data dan Informasi Pembangunan

Kemajuan teknologi informasi dan tantangan global menuntut pemanfaatan big data sebagai dasar pengambilan keputusan terintegrasi. Pemanfaatan memanfaatkan big data akan berdampak meningkatkan akurasi kebijakan dan ketepatan pengambilan keputusan. Isunya adalah bagaimana pemerintah daerah menghasilkan perencanaan pembangunan dan produk kebijakan yang visioner berbasis data yang akurat dan terbaru serta berperspektif kependudukan yang berorientasi pada kualitas pelayanan publik. Ketersediaan, kelengkapan, kebaruan, keakuratan, dan integrasi data untuk perencanaan dan evaluasi kinerja pembangunan, menjadi inti dari isu ini.

b. Kota Cerdas (*Smart City*) / Kabupaten Cerdas (*Smart City*) Konsep *smart city* adalah kota yang mampu mengelola semua sumber daya yang ada dengan lebih efektif dan efisien untuk

memaksimalkan pelayanan kepada masyarakat serta mendukung pembangunan yang berkelanjutan. Kota cerdas (smart city) terdiri atas 6 (enam) komponen pembentuk yaitu (Cohen, 2013):

- 1) *Smart Governance* (pelayanan publik berbasis teknologi informasi, dimana interaksi pemerintah dengan warga dan sektor bisnis, serta pengambilan keputusan berbasis *real time data*);
- 2) *Smart Economy* (pemanfaatan teknologi informasi dan internet memaksimalkan potensi peningkatan dan pemasaran produk UMKM dan produk lokal, semisal pemanfaatan *e-commerce*);
- 3) *Smart Mobility* (penerapan sistem cerdas untuk mendukung layanan transportasi publik, logistik, dan kenyamanan bagi pengguna mobil, sepeda, dan pejalan kaki);
- 4) *Smart Environment* (pemanfaatan sumber energi terbarukan, sistem monitor dan pengendalian polusi, *green building*);
- 5) *Smart Branding* (Pemerintah daerah yang dapat membangun identitas, simbol, logo, atau merek yang melekat sesuai dengan potensi maupun positioning yang menjadi target daerah tersebut);
- 6) *Smart People* (masyarakat yang cerdas karena mendapatkan kesempatan pendidikan dan pengembangan *skill* yang luas dengan penerapan sistem dan teknologi);
- 7) *Smart Living* (pola hidup yang cerdas, sehat, dan aman, didukung kualitas lingkungan hunian yang baik).

1.4. Landasan Hukum

Laporan Kinerja DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA ini disusun berdasarkan beberapa dasar hukum antara lain adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah.
2. Peraturan Pemerintah (PP) No. 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah
3. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
5. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Pelaporan Kinerja Pemerintah Daerah.
6. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 5 tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 16 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karanganyar;
7. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 116 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;

1.5. Sistematika Penulisan.

Sistematika Penulisan LKjIP Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Karanganyar 2024 mengacu pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, sebagai berikut:

BAB I. Pendahuluan.

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (*strategic issued*) yang sedang dihadapi.

BAB II. Perencanaan Strategis.

Pada Bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Karanganyar Tahun 2024.

BAB III. Akuntabilitas Kinerja.

Pada bab ini disajikan Capaian Kinerja Organisasi dan Realisasi Anggaran. Capaian Kinerja Organisasi untuk setiap pernyataan kinerja,

sasaran strategis sesuai dengan hasil pengukuran kinerja. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut:

- 1) Metode pengukuran kinerja Perangkat Daerah
- 2) Capaian kinerja membandingkan antara realisasi dan capaian tahun 2024 dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir
- 3) Capaian Kinerja membandingkan realisasi tahun 2024 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan.
- 4) Analisis penyebab keberhasilan / kegagalan atau peningkatan / penurunan/ kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan
- 5) Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya
- 6) Akuntabilitas Program / kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

BAB IV. Penutup.

Pada bab ini diuraikan kesimpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan untuk meningkatkan kinerjanya.

Lampiran :

Pada lampiran berisi Perjanjian Kinerja dan data lain yang dianggap perlu.

BAB II

PERENCANAAN STRATEGIS

A. Perencanaan Strategis.

Rencana Strategis (Renstra) sangat diperlukan oleh masing-masing Pemerintah Daerah, Renstra akan membantu para Kepala Perangkat Daerah dan seluruh jajarannya dalam menentukan arah dan tujuan yang ingin dicapai, sehingga Organisasi Perangkat Daerah dapat lebih berperan dalam memberikan respon terhadap berbagai perubahan dan tuntutan lingkungan. Disamping itu rencana strategis akan memperjelas konsep Organisasi Perangkat Daerah dalam melakukan aktivitas agar tujuan dapat tercapai secara efektif dan efisien dengan mempertimbangkan seluruh potensi dan kemampuan yang ada secara integral komprehensif.

Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, penyelenggaraan SAKIP meliputi rencana strategis, perjanjian kinerja, pengukuran kinerja, pengelolaan data kinerja, pelaporan kinerja, review dan evaluasi kinerja. Rencana strategis menjadi landasan dalam penyelenggaraan SAKIP. Perencanaan strategis merupakan proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu 1(satu) sampai dengan 5 (lima) tahun dengan memperhitungkan seluruh aspek baik yang menyangkut potensi, peluang dan kendala yang ada. Perencanaan strategis harus disusun secara integral komprehensif dan implementatif sehingga dapat dilaksanakan dengan efektif dan efisien serta dapat mencapai hasil yang optimal. Sebagai bentuk perwujudan perencanaan dan strategis 5 tahunan dapat dilihat dalam tabel 2.1 di bawah ini :

Tabel 2.1

Tujuan, Sasaran, Indikator dan Target Kinerja
Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Karanganyar
Tahun 2024-2026

No	Tujuan / Sasaran	Indikator Kinerja	Target Capaian		
			2024	2025	2026
1.	- Meningkatkan pemerintahan yang berkualitas dengan semangat Reformasi Birokrasi - Meningkatkan akuntabilitas kinerja - Meningkatkan keterbukaan informasi publik, ketersediaan data statistik dan pemanfaatan persandian	1. Hasil penilaian dari Kemen atas IRB Kabupaten	65	67	70
		2. Indeks SPBE	3,55	3,60	3,70
		3. Nilai SAKIP	72,5	73	73,50
		4. Persentase website resmi perangkat yang terupdate (DIP) melalui wesite	100	100	100
		5. Jumlah KIM aktif	25	28	31
		6. Persentase aplikasi pemerintah untuk mendukung layanan publik	39	40	41
		7. Tingkat keamanan informasi pemerintah	63	64	65
		8. Persentase ketersediaan data statistic sektoral	100	100	100

Sumber : Renstra 2024-2026

Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika telah ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Karanganyar yang diwujudkan dalam bentuk dokumen RPD Tahun 2024-2026 dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 11 tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Karanganyar.

Untuk mendukung pelaksanaan program dan kegiatan Pemerintah Kabupaten Karanganyar Tahun 2024-2026, Diskominfo Kabupaten Karanganyar telah menetapkan 1 (satu) tujuan dan 2 (dua) sasaran strategis serta 8 (delapan) indikator secara terukur dan dapat dicapai secara nyata.

B. Rencana Kinerja Tahunan.

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) merupakan salah satu instrument SAKIP. RKT diperlukan agar dalam penyusunan Renja menjadi fokus dan diarahkan pada rencana kinerja yang telah direncanakan pada RENSTRA sesuai dengan

tahun berkenaan. Sehingga dengan demikian diharapkan pelaksanaan program dan kegiatan tidak hanya diorientasikan pada terlaksananya kegiatan (*output*), akan tetapi perencanaan program dan kegiatan harus direncanakan untuk menghasilkan manfaat (*outcome*) yang sebesar-besarnya bagi masyarakat. Rencana Kinerja Tahunan diturunkan dari Tujuan dan Sasaran Strategis Pembangunan yang disertai dengan Indikator Kinerja Utama dan target kinerja yang ada pada RENSTRA Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Karanganyar Tahun 2024 – 2026.

Rencana Kinerja Tahunan, perlu dilakukan oleh instansi pemerintah agar dapat menyusun prioritas program dan kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang terbatas. Dengan perencanaan kinerja tersebut diharapkan fokus dalam mengarahkan dan mengelola program atau kegiatan instansi akan lebih baik, sehingga diharapkan tidak ada kegiatan instansi yang tidak terarah.

Adapaun Rencana Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Karanganyar 2024 sebagaimana dalam Lampiran Laporan ini.

TABEL 2.2
RENCANA KINERJA TAHUNAN DISKOMINFO TAHUN 2024

Tujuan / Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1. Meningkatkan pemerintahan yang berkualitas dengan semangat Reformasi Birokrasi	- Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	65
	- Indeks SPBE	Indeks	3,55
2. Meningkatkan akuntabilitas Kinerja	- SAKIP	Nilai Sakip	72,5
3. Meningkatnya keterbukaan informasi publik, ketersediaan data statistik dan pemanfaatan Persandian	- Persentase website Perangkat Daerah yang terupdate (DIP) melalui website	Persentase	100
	- Jumlah KIM Aktif	Jumlah	25
	- Persentase aplikasi pemerintah untuk mendukung layanan publik	Persentase	39
	- Persentase Tingkat Keamanan Informasi Pemerintah	Persentase	63
	- Persentase ketersediaan data statistik sektoral daerah	Persentase	100

C. Perjanjian Kinerja (PK) 2024.

Perjanjian Kinerja merupakan tekad atau janji Pejabat Publik, untuk mencapai kinerja yang telah diperjanjikan sebagai konsekuensi atas penggunaan sumber daya yang tersedia. Melalui PK, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia.

Penyusunan PK Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Karanganyar 2024, disusun mengacu pada dokumen RENSTRA Tahun 2024-2026, dokumen Rencana Kinerja Tahunan, dokumen Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Karanganyar Tahun 2024.

Adapaun Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Karanganyar Tahun 2024 sebagaimana dalam Lampiran Laporan ini.

Tabel 2.3
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
DISKOMINFO KABUPATEN KARANGANYAR

NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Meningkatnya pemerintahan yang berkualitas dengan semangat Reformasi Birokrasi	Indeks Reformasi Birokrasi	65
		Indeks SPBE	3,55
2.	Meningkatkan akuntabilitas kinerja	Nilai SAKIP	72,5
3.	Meningkatnya keterbukaan informasi publik, ketersediaan data statistik dan pemanfaatan Persandian	Persentase website resmi perangkat daerah yang terupdate (DIP) melalui website	100
		Jumlah KIM Aktif	25
		Persentase aplikasi pemerintah untuk mendukung layanan publik	39
		Persentase Tingkat keamanan informasi Pemerintah	63
		Persentase ketersediaan data statistik sektoral daerah	100

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. Capaian Kinerja Organisasi.

Pelaksanaan pembangunan daerah jangka menengah Kabupaten Karanganyar pada tahun 2024 merupakan tahun pertama pelaksanaan RPD 2024-2026. Berbagai program dan kegiatan dilaksanakan dalam rangka pencapaian tujuan pembangunan daerah Kabupaten Karanganyar (RPD) tahun 2024-2026 yaitu untuk mengetahui tingkat ketercapaian kinerja pada tahun 2024, maka dilakukan pengukuran capaian kinerja masing-masing tujuan dan sasaran sesuai yang diperjanjian dalam PK tahun 2024

Kerangka Pengukuran kinerja Perangkat Daerah dalam hal ini Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Karanganyar dilakukan dengan mengacu ketentuan dalam Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014, Permenpan RB No. 12 tahun 2015 pada Lembar Kriteria Evaluasi dan Permenpan RB Nomor 53 Tahun 2014. Adapun pengukuran kinerja tersebut dengan rumus sebagai berikut:

- Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan makin rendahnya kinerja, digunakan rumus :

$$\text{CAPAIAN INDIKATOR KINERJA} = \frac{\text{REALISASI}}{\text{TARGET}} \times 100\%$$

- Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja, digunakan rumus :

$$\text{CAPAIAN INDIKATOR KINERJA} = \frac{\text{TARGET} - (\text{REALISASI} - \text{TARGET})}{\text{TARGET}} \times 100\%$$

atau

$$\text{CAPAIAN INDIKATOR KINERJA} = \frac{(2 \times \text{TARGET}) - \text{REALISASI}}{\text{TARGET}} \times 100\%$$

Penilaian capaian kinerja untuk setiap indikator kinerja sasaran menggunakan interpretasi skala nilai dan kriteria penilaian untuk kinerja organisasi yang dilaporkan dalam bentuk *outcome*, selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisa untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai keberhasilan atau ketidakberhasilan pencapaian kinerja

Tabel 3.1
Kriteria Penilaian.

Skala Nilai	Kategori Penilaian
> 100 %	Melebihi Target
100 %	Sesuai Target
< 100 %	Di bawah Target

Pengukuran capaian kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Karanganyar tahun 2024 dilakukan dengan cara membandingkan antara target dan realisasi IKU Perangkat Daerah dengan perbandingan sebagai berikut :

1. Indeks Reformasi Birokrasi

(Disajikan dalam bentuk tabel)

Perbandingan antara target, realisasi dan capaian tahun pengukuran Indeks Reformasi Birokrasi tahun 2024 adalah sebagai berikut :

- Target : 65 %
- Realisasi : 84,47 %
- Capaian : 129,9 %

2. Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).

(Disajikan dalam bentuk tabel)

Perbandingan antara target, realisasi dan capaian tahun pengukuran Indeks SPBE tahun 2024 adalah sebagai berikut :

- Target : 3,55 %
- Realisasi : 3,90 %
- Capaian : 109,85 %

Sasaran strategis yang pertama adalah :

3. Nilai SAKIP.

(Disajikan dalam bentuk tabel)

Perbandingan antara target, realisasi dan capaian tahun pengukuran SAKIP tahun 2024 adalah sebagai berikut :

- Target : 72,5 %
- Realisasi : 70,95 %
- Capaian : 97 %

Sasaran strategis yang ke 2 (dua)

4. Persentase website resmi Perangkat Daerah yang terupdate (DIP) melalui website.

(Disajikan dalam bentuk tabel)

Perbandingan antara target, realisasi dan capaian tahun pengukuran Persentase website Perangkat Daerah yang terupdate (DIP) melalui website tahun 2024 adalah sebagai berikut :

- Target : 100%
- Realisasi : 100 %
- Capaian : 100 %

5. Jumlah KIM Aktif

(Disajikan dalam bentuk tabel)

Perbandingan antara target, realisasi dan capaian tahun pengukuran Persentase KIM aktif tahun 2024 adalah sebagai berikut :

- Target : 25 %
- Realisasi : 24%
- Capaian : 96 %

6. Persentase aplikasi pemerintah untuk mendukung layanan publik

(Disajikan dalam bentuk tabel)

Perbandingan antara target, realisasi dan capaian tahun pengukuran Persentase aplikasi pemerintah untuk mendukung layanan publik tahun 2024 adalah sebagai berikut :

- Target : 39 %
- Realisasi : 52,63 %
- Capaian : 134,9 %

7. Tingkat Keamanan Informasi Pemerintah.

(Disajikan dalam bentuk tabel)

Perbandingan antara target, realisasi dan capaian tahun pengukuran Persentase Tingkat Keamanan Informasi Pemerintah tahun 2024 adalah sebagai berikut :

- Target : 63 %
- Realisasi : 62,3 %
- Capaian : 98,89 %

8. Persentase ketersediaan data statistik sektoral daerah.

(Disajikan dalam bentuk tabel)

Perbandingan antara target, realisasi dan capaian tahun pengukuran Persentase ketersediaan data statistik tahun 2024 adalah sebagai berikut :

- Target : 100 %
- Realisasi : 100 %
- Capaian : 100 %

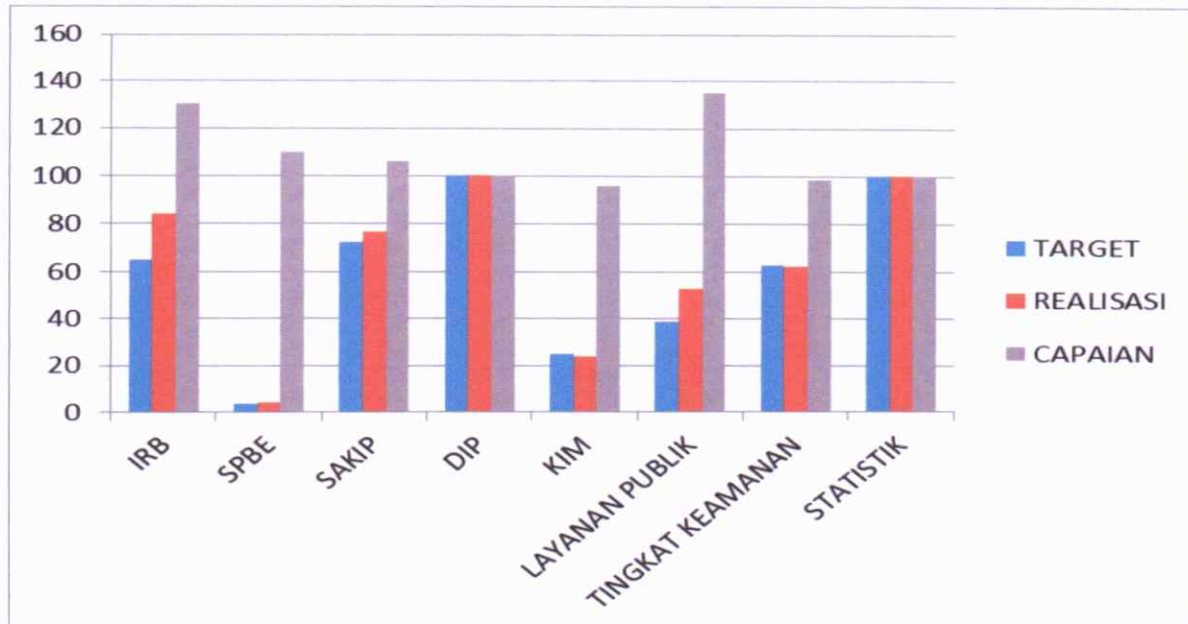
Agar lebih jelas bahwa target, realisasi dan capaian dapat dilihat pada tabel 3.2 dibawah ini :

Tabel 3.2
Ringkasan Capaian Indikator Kinerja Utama
Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Karanganyar Tahun 2024

NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	TARGET 2024	REALISASI	CAPAIAN %
1.	Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	65	84,47	129,9
2.	Indeks SPBE	Indeks	3,55	3,90	109,85
3.	Nilai SAKIP	Nilai	72,5	70,95	97
4.	Persentase website resmi Perangkat Daerah yang teruptade (DIP) melalui website	%	100	100	100
5.	Jumlah KIM aktif	Jumlah	25	24	96
6.	Persentase aplikasi pemerintah untuk mendukung layanan publik	%	39	52,63	134,9
7.	Persentase Tingkat Keamanan Informasi Pemerintah	%	63	62,3	98,89
8.	Persentase ketersediaan data statistik sektoral daerah	%	100	100	100
	Capaian rata rata				108,31

Berdasarkan tabel 3.2 dari 8 (delapan) Indikator Kinerja Utama Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Karanganyar rata-rata capaian indikator kinerjanya sebesar 18,31% atau dapat dilihat pada gambar 3.1 dibawah ini :

Gambar 3.1
Grafik Capaian Indikator Kinerja Utama
Diskominfo Kabupaten Karanganyar Tahun 2024



Sumber : Diskominfo Kab. Kra 2024

dan berdasarkan pengukuran pada tabel 3.2 dapat di simpulkan sebagai berikut :

1. Capaian kinerja Indeks Reformasi Birokrasi sebesar 129,9 artinya melebihi target yang ditetapkan.
2. Capaian kinerja SPBE sebesar 109,85 artinya melebihi target yang ditetapkan.
3. Capaian kinerja SAKIP sebesar 97 artinya melebihi target yang ditetapkan.
4. Capaian kinerja Persentase website resmi Perangkat Daerah yang teruptade (DIP) melalui website sebesar 100 artinya sesuai target yang ditetapkan.
5. Capaian kinerja jumlah KIM aktif sebesar 96 artinya di bawah target yang ditetapkan.
6. Capaian kinerja Persentase aplikasi pemerintah untuk mendukung layanan publik sebesar 134,9 artinya melebihi target yang ditetapkan.
7. Capaian kinerja Persentase Tingkat Keamanan Informasi Pemerintah sebesar 98,89 artinya di bawah target yang ditetapkan.
8. Capaian kinerja Persentase ketersediaan data statistik sektoral daerah sebesar 100 artinya sesuai target yang ditetapkan.

Selanjutnya untuk evaluasi dan analisis capaian kinerja tujuan dan sasaran strategis RENSTRA Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Karanganyar 2024-2026, untuk capaian kinerja tahun 2024 akan dijelaskan dibawah ini.

C. Analisis Capaian Kinerja, Tujuan dan Sasaran.

Analisis dilakukan terhadap capaian kinerja sasaran strategis yang secara langsung/sekaligus mendukung tercapainya tujuan dengan membandingkan antara target dengan realisasi tahun 2023 dengan tahun 2024, serta mengkaitkan dengan kemungkinan tercapainya sasaran pada tahun terakhir Perencanaan Jangka Menengah OPD (RENSTRA) tahun 2024-2026. Analisis terhadap 2 (dua) sasaran strategis dengan 8 (delapan) Indikator Kinerja yang ditetapkan sebagai alat untuk mewujudkan tujuan serta sasaran pada RENSTRA 2024-2026.

Dari hasil pengukuran untuk tujuan ***Terwujudnya, tata kelola pemerintahan yang baik***, tujuan ini dapat dicapai dengan 2 (dua) sasaran strategis dan 8 (delapan) indikator, dengan pengukuran serta analisis capaian kinerja adalah sebagai berikut :

1. Indeks Reformasi Birokrasi

- Perbandingan capaian kinerja antara tahun pengukuran dengan tahun sebelumnya Indeks Reformasi Birokrasi realisasi yaitu :
 - Tahun 2022 adalah 62,01
 - Tahun 2023 adalah 70,91
 - Tahun 2024 adalah 84,47

Artinya mengalami peningkatan.

- Perbandingan capaian kinerja tahun pengukuran (kumulatif) dengan target akhir Renstra.

Jika dibandingkan dengan target akhir renstra Diskominfo kabupaten Karanganyar Tahun 2018-2023, maka capaian Indeks Reformasi Birokrasi 129,9% dari target akhir periode Renstra. `

- Analisa nilai tahun 2024 mengalami peningkatan meskipun ada beberapa tambahan yang menjadi tolok ukur dari Kemenpan

2. Indeks SPBE

- Perbandingan capaian kinerja antara tahun pengukuran dengan tahun sebelumnya, Indeks SPBE realisasi yaitu :

- Tahun 2022 adalah 3,32
- Tahun 2023 adalah 3,52
- Tahun 2024 adalah 3,90

artinya mengalami peningkatan

- Perbandingan capaian kinerja tahun pengukuran (kumulatif) dengan target akhir Renstra.

Jika dibandingkan dengan target akhir renstra Diskominfo kabupaten Karanganyar Tahun 2018-2023, maka capaian persentase SPBE 109,85 % dari target takhir periode Renstra.

- Analisa pencapaian indikator tujuan, capaian kinerja SPBE Tahun 2024 mengalami peningkatan dan sudah memenuhi target 2024, hal ini disebabkan :
 - a. Sudah tersedianya Arsitektur SPBE Nasional sebagai pedoman pengembangan Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah.
 - b. Tersedianya dokumen pendukung SPBE di Kabupaten Karanganyar, antara terutama : Manajemen SPBE.
 - c. Terintegrasinya aplikasi dan *database* antar OPD di Kabupaten Karanganyar dan Pemerintah Pusat.
 - d. Terlaksananya *desk* evaluasi SPBE ke semua OPD dalam pembuatan dokumen SPBE.

3. Nilai SAKIP

- Perbandingan capaian kinerja antara tahun pengukuran dengan tahun sebelumnya, Indeks SAKIP realisasi yaitu :

- Tahun 2022 adalah 70,35
- Tahun 2023 adalah 72
- Tahun 2024 adalah 70,95

- **Perbandingan capaian kinerja tahun pengukuran (kumulatif) dengan target akhir Renstra.**

Jika dibandingkan dengan target akhir renstra Diskominfo kabupaten Karanganyar Tahun 2018-2023, maka capaian SAKIP 97 dari target takhir periode Renstra.

- Analisa meningkatnya capaian kinerja SAKIP karena tahun 2024 ini terlihat tren positif terbukti dengan perbaikan tata kelola pemerintahan dan